

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI *Simak Desa* OLEH PEMERINTAH DESA SEKARWANGI KECAMATAN MALANGBONG KABUPATEN GARUT

Imas Popi Nopi Yanti

Universitas Galuh

Email : imaspopinoviyaniti@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian dilatarbelakangi adanya masalah Implementasi Kebijakan Tentang Penggunaan Aplikasi Simak Desa Oleh Pemerintah Desa Sekarwangi belum berjalan optimal, terlihat adanya sosialisasi penggunaan aplikasi simak desa belum tersampaikan oleh Pemerintah Desa Sekarwangi kepada masyarakat, kemampuan sumber daya pelaksana kebijakan aplikasi simak desa kurang optimal, kurangnya keinginan pengelola memperbaiki aplikasi simak desa yang tidak bisa digunakan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tentang penggunaan aplikasi simak desa oleh Pemerintah Desa Sekarwangi. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan, tehnik sampling purposive sampling. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Tentang Penggunaan Aplikasi Simak Desa belum berjalan dengan optimal pelaksanaannya jika dikaitkan dengan teori George C. Edward III (Subarsono, 2021:90-92) meliputi : (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi. Adapun hambatan kurang maksimalnya penyuluhan kepada masyarakat, petugas pengelola aplikasi masih belum konsisten dalam memberikan informasi tentang kemudahan menggunakan aplikasi simak desa, masih kurangnya kesiapan dari segi kompetensi pengelola aplikasi, masih kurangnya dedikasi dari pengelola aplikasi. Upaya mengatasi hambatan yaitu pemerintah desa harus melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat agar memberikan informasi secara jelas, pengelola aplikasi harus konsisten dalam menyampaikan informasi kemudahan menggunakan simak desa, meningkatkan kompetensi pengelola aplikasi, meningkatkan komitmen pengelola aplikasi simak desa untuk mewujudkan program desa digital.

Kata kunci : *Implementasi, Kebijakan, Simak Desa*

PENDAHULUAN

Desa adalah sebuah bagian kepada penduduknya dengan mudah terkecil dari pemerintahan secara dan tidak berbelit-belit, dalam hukum diakui oleh Indonesia. Salah melakukan kepengurusan surat-surat di satunya tugas pemerintah yaitu kantor desa ada beberapa permasalahan memberikan pelayanan administrasi yang di hadapi oleh instansi

pemerintahan desa dimana proses pelayanan surat menyurat masih menggunakan cara konvensional, belum lagi petugas harus mencatat data permohonan ke dalam buku besar. Sedangkan masyarakat dalam melakukan pengurusan surat-surat di kantor desa dapat menjadi hal yang sulit, apalagi jika memiliki kesibukan di tempat kerja harus meluangkan atau menyempatkan mencari waktu yang tepat untuk mengurusnya, sedangkan waktu yang di miliki untuk mengurus surat-surat tidak terlalu banyak.

Diera globalisasi ini, kemajuan teknologi sangat berkembang pesat dalam pelayanan publik berbasis aplikasi sudah menjadi bagian penting untuk mempermudah suatu pelayanan baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Semenjak terjadinya pandemi covid-19 pelayanan online sangat membantu sekali karena bisa dilakukan dimanapun, kapanpun tanpa harus datang langsung.

Aplikasi Simak Desa sebuah konsep teknologi dalam pembangunan pelayanan publik berbasis aplikasi untuk masyarakat agar mempermudah, menghemat waktu dalam surat menyurat bisa dilakukan di rumah dan tidak perlu datang langsung ke desa, ketika proses surat sudah beres baru kemudian bisa di ambil ke desa oleh masyarakat yang sudah melakukan login dan memasukkan berkas-berkas persyaratan untuk surat yang dibutuhkan.

Implementasi Kebijakan menjadi suatu kegiatan dengan sangat

banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, suatu implementasi salah satunya banyak juga faktor yang bisa mempengaruhi tidak berhasilnya suatu implementasi kebijakan. Begitu sangat penting dalam setiap implementasi harus adanya suatu perencanaan untuk sebuah kebijakan yang ditetapkan, tidak akan bisa berjalan dengan semestinya apabila sebuah implementasi dilaksanakan tanpa perencanaan yang matang.

Setiawan (2004; 39), menyebutkan bahwa implementasi yaitu perluasan aktivitas yang saling berkaitan dengan proses interaksi antara tujuan dan tindakan agar tercapai serta membutuhkan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Harsono (2002; 67), mengemukakan bahwa implementasi yaitu sebuah proses untuk menjalankan sebuah kebijakan menjadi sebuah tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Peningkatan sebuah kebijakan merupakan rangka untuk menyempurnakan sebuah program.

Dalam pandangan Edward III, ada empat variabel yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan .George C.Edwards III (Subarsono,2021:90-92) mengemukakan empat variabel tersebut yaitu :

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber Daya

- 3) Disposisi
- 4) Struktur Birokrasi

Dimensi Pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan beberapa konsep dan sifat tindakan yang berkenaan dengan pelaksanaan *good governance*, menurut Rian Nugroho (2017:49) pelaksanaan kebijakan dapat diukur/dievaluasi berdasarkan dimensi-dimensi :

- a. Konsistensi.
- b. Transparansi.
- c. akuntabilitas.
- d. keadilan.
- e. efektivitas.
- f. efisiensi.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: Implementasi Kebijakan Tentang Penggunaan Aplikasi *Simak Desa* Oleh Pemerintah Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui : Implementasi Kebijakan Tentang Penggunaan Aplikasi *Simak Desa* Oleh Pemerintah Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut. Menurut Arikunto (2013:3) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hasilnya dipaparkan ke dalam bentuk laporan penelitian.

Dalam penelitian deskriptif kualitatif merupakan narasi yang

menguraikan suatu kualitas fenomena yang biasanya tidak dapat di ukur secara numerik ,data kualitatif digunakan untuk riset dimana objek yang di teliti tidak bisa di ukur dengan mudah.

Metode yang digunakan untuk memperoleh data yaitu dengan wawancara dan observasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* orang yang dianggap paling tahu dengan permasalahan penelitian. *Purposive sampling* menurut Sugiyono (2018:138) merupakan pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kriteria yang diperlukan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti.

1. Studi Kepustakaan

Menurut Supranto (Ruslan, 2008:31) berpendapat bahwa studi kepustakaan adalah dilakukan untuk mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.

a. Studi Literatur

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan, yang berhubungan dengan masalah yang akan di pecahkan.

- b. Studi Dokumentasi
Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar berupa laporan, serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.
2. Studi Lapangan
Yaitu teknik pengumpulan data yang di lakukan secara langsung dari lokasi penelitian, dengan cara:
- a. Observasi
Menurut Arikunto (2013:143) menyatakan observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti serta pencatatan secara sistematis.
- b. Wawancara
Menurut Sugiyono (2014:138) wawancara yang dilakukan peneliti dengan *interview* wawancara yang tersruktur dengan menggunakan pedoman wawancara, alat tulis dan alat bantu lainnya, digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Tentang Penggunaan Aplikasi *Simak Desa* Oleh Pemerintah Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dapat diukur sebagaimana implementasi kebijakan yang diungkapkan menurut George C. Edward III (Subarsono,2021:90-92) meliputi : (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi.

Untuk penjelasan lebih lanjut diuraikan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Agar implementasi dapat berjalan dengan efektif, yang bertanggung jawab melaksanakan harus mengetahui apakah mereka sanggup untuk melakukannya. Karena implementasi kebijakan dapat diterima oleh semua pelaksana yang terlibat dapat dimengerti secara jelas mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Ketika pelaksana tidak dapat memahami apa yang harus mereka lakukan meskipun dipaksakan maka tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Sebuah komunikasi kepada pelaksana secara serius sangat diperlukan karena dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.

Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan untuk menyampaikan informasi tentang penggunaan aplikasi *simak desa* kepada masyarakat Desa Sekarwangi agar dapat berjalan dengan baik. Komunikasi ini dilakukan oleh

Pemerintah Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut. Untuk mengkomunikasikan kebijakan ini kepada masyarakat maka dari itu penyampaiannya harus benar dan tepat agar masyarakat dapat memahaminya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis mengenai Implementasi Kebijakan Tentang Penggunaan Aplikasi *Simak Desa* Oleh Pemerintah Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut pada dimensi komunikasi. Berikut uraian berdasarkan indikator-indikator permasalahannya :

Dalam dimensi komunikasi terdapat 4 indikator yaitu sosialisasi tentang cara penggunaan aplikasi *simak desa* kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa Sekarwangi, cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang penggunaan aplikasi *simak desa*, pemerintah Desa Sekarwangi memberikan pengarahan tentang kejelasan pelayanan menggunakan aplikasi *simak desa*, pemerintah Desa Sekarwangi memberikan informasi tentang konsistensi kemudahan dalam menggunakan aplikasi *simak desa*.

Dalam dimensi komunikasi terkait dengan sosialisasi tentang cara penggunaan aplikasi *simak desa* kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa Sekarwangi, dapat dikatakan cukup baik. Dengan melakukan pelatihan, mengundang rt dan rw yang bertujuan

nantinya informasi yang disampaikan akan dapat disampaikan kepada warga sekitar.

Dalam dimensi komunikasi terkait dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang penggunaan aplikasi *simak desa* belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat Desa Sekarwangi. Secara garis besar bahwa masih banyak warga masih belum mengetahui informasi tentang adanya aplikasi *simak desa* tersebut.

Dalam dimensi komunikasi terkait pemerintah Desa Sekarwangi memberikan pengarahan tentang kejelasan pelayanan menggunakan aplikasi *simak desa* dapat dikatakan cukup baik. Dengan adanya penjelasan informan bahwa penggunaan aplikasi *simak desa* dapat mempermudah masyarakat dalam hal pelayanan administrasi.

Dalam dimensi pemerintah Desa Sekarwangi memberikan informasi tentang konsistensi kemudahan dalam menggunakan aplikasi *simak desa* dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Untuk kemudahan penggunaan aplikasi *simak desa* masih belum diketahui oleh masyarakat.

Hal ini sesuai dengan teori George C. Edwards III (Subarsono, 2021:90) mengungkapkan bahwa komunikasi merupakan keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran

kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu Masih kurang maksimalnya penyuluhan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa Sekarwangi tentang penggunaan aplikasi *simak desa*, petugas pengelola aplikasi masih belum konsisten dalam memberikan informasi tentang kemudahan menggunakan aplikasi *simak desa* kepada masyarakat karena masyarakat masih belum mengetahui kemudahan aplikasi *simak desa*.

Adapun Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu pemerintah desa harus melakukan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat Desa Sekarwangi agar dapat memberikan informasi secara jelas tentang penggunaan aplikasi *simak desa*, pengelola aplikasi harus konsisten dalam menyampaikan informasi tentang kemudahan pelayanan menggunakan aplikasi *simak desa* kepada masyarakat.

2. Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor penting demi terselenggaranya implementasi kebijakan dengan baik, maka dari itu diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai *skill* atau kemampuan yang harus dimiliki oleh

pelaksana Implementasi Kebijakan Tentang Penggunaan Aplikasi *Simak Desa* Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis mengenai Implementasi Kebijakan Tentang Penggunaan Aplikasi *Simak Desa* Oleh Pemerintah Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut pada dimensi sumber daya . Berikut uraian berdasarkan indikator-indikator permasalahannya :

Dalam dimensi sumber daya terdapat 3 indikator yaitu kemampuan pengelola untuk mengimplementasikan kebijakan penggunaan aplikasi *simak desa*, sarana pendukung yang tepat untuk menyampaikan atau mensosialisasikan aplikasi *simak desa*, anggaran untuk mewujudkan smart desa digital di Desa Sekarwangi.

Dalam dimensi sumber daya terkait dengan kemampuan pengelola untuk mengimplementasikan kebijakan penggunaan aplikasi *simak desa* bahwa kemampuan pengelola dapat dikatakan belum masih belum optimal untuk menjalankan program desa digital. Aplikasi *simak desa* sudah lama tidak bisa diakses oleh Pemerintah Desa Sekarwangi, sehingga aplikasi *simak desa* belum bisa sampai kepada masyarakat.

Dalam dimensi sumber daya terkait dengan sarana pendukung yang tepat untuk menyampaikan atau mensosialisasikan aplikasi *simak desa*, mensosialisasikan aplikasi *simak desa*

didukung dengan fasilitas fisik tersedia wifi, juga terdapat komputer untuk Pemerintah Desa dalam bekerja sudah cukup baik.

Dalam dimensi sumber daya terkait dengan anggaran untuk mewujudkan smart desa digital di Desa Sekarwangi. dapat dikatakan sudah cukup baik. Sudah tersedianya anggaran untuk program desa digital agar bisa berjalan.

Hal ini sesuai dengan pandangan Rian Nugroho (2017:49) Efisiensi berkaitan dengan jumlah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yaitu hubungan antara efektivitas dan penggunaan sumberdaya. Indikator ukuran dapat digunakan pada dimensi efisiensi adalah penggunaan sumberdaya dibutuhkan untuk bisa mencapai tujuan yang ditetapkan, dapat diukur dengan tingkat penggunaan waktu, biaya, manusia, peralatan, dan sumber daya lainnya.

Adapun hambatan yang dihadapi yaitu masih kurangnya kesiapan dari segi kompetensi petugas pengelola aplikasi *simak desa* untuk mewujudkan program desa digital.

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan yaitu harus adanya peningkatan kompetensi dari petugas pengelola aplikasi, juga konsistensi untuk mengimplementasikan aplikasi *simak desa* kepada masyarakat.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh

penulis mengenai Implementasi Kebijakan Tentang Penggunaan Aplikasi *Simak Desa* Oleh Pemerintah Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut pada dimensi Disposisi . Berikut uraian berdasarkan indikator-indikator permasalahannya :

Dalam dimensi disposisi terdapat 3 indikator yaitu pemerintah pengelola aplikasi mempunyai kejujuran, dan sifat demokrasi dalam menjalankan kebijakan penggunaan aplikasi *simak desa*, sistem penunjukan pengelola aplikasi *simak desa* dilakukan untuk melihat kemampuan pemerintah desa dalam bidang pengelolaan data, komitmen pengelola aplikasi dalam mengimplementasikan kebijakan penggunaan aplikasi *simak desa*.

Dalam dimensi disposisi terkait dengan pemerintah pengelola aplikasi mempunyai kejujuran, dan sifat demokrasi dalam menjalankan kebijakan penggunaan aplikasi *simak desa* masih belum optimal. Hal itu terlihat dengan adanya masyarakat yang masih belum mengetahui adanya aplikasi *simak desa*.

Dalam dimensi disposisi terkait dengan sistem penunjukan pengelola aplikasi *simak desa* dilakukan untuk melihat kemampuan pemerintah desa dalam bidang pengelolaan data sudah sesuai. Dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsinya yang seharusnya.

Dalam dimensi disposisi terkait dengan komitmen pengelola aplikasi dalam mengimplementasikan kebijakan penggunaan aplikasi *simak desa*, dapat

dikatakan cukup baik. Dapat dilihat dari adanya pengaplikasian di pelayanan sehari-hari.

Hal ini sesuai dengan pendapat Gerge C. Edward III (Leo Agustino,2022:157) yaitu dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya.

Adapun hambatan yang dihadapi yaitu masih kurangnya keinginan dari pelaksana implementasi kebijakan untuk memperbaiki kendala yang terjadi di lapangan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu Perlunya perubahan sikap dari petugas pengelola aplikasi untuk lebih antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang dimiliki untuk mengimplementasikan Kebijakan Penggunaan Aplikasi Simak Desa Oleh Pemerintah Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut sudah tersedia. Adanya penunjukan untuk tugas dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan implementasi kebijakan. Dengan adanya kejelasan tugas dan fungsi akan memberikan kemudahan dalam mengerjakan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis mengenai Implementasi Kebijakan Tentang Penggunaan Aplikasi *Simak Desa* Oleh Pemerintah Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut pada dimensi Struktur birokrasi. Berikut uraian berdasarkan indikator-indikator permasalahannya :

Dalam dimensi struktur birokrasi terdapat 3 indikator yaitu *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam mengimplementasikan kebijakan tentang penggunaan aplikasi *simak desa* dalam memberikan pelayanan publik agar mempermudah, dan mengefisienkan waktu, pemberian tanggung jawab pengelola aplikasi *simak desa*, pembagian kewenangan langsung untuk pengelola aplikasi *simak desa*.

Dalam dimensi *struktur birokrasi terkait dengan Standard Operational Procedure* (SOP) dalam mengimplementasikan kebijakan tentang penggunaan aplikasi *simak desa* dalam memberikan pelayanan publik agar mempermudah, dan mengefisienkan waktu, SOP dalam upaya menjalankan implementasi kebijakan dapat dikatakan cukup baik. Terlihat dengan adanya *Standard Operational Procedure* (SOP) pengelola aplikasi *simak desa* untuk menjalankan implementasi kebijakan.

Dalam dimensi struktur birokrasi terkait dengan pemberian tanggung jawab pengelola aplikasi *simak desa* dapat dikatakan sudah cukup baik. Dapat dilihat dengan adanya pemberian

tanggung jawab untuk dilakukan oleh pengelola aplikasi *simak desa*.

Dalam dimensi struktur birokrasi terkait dengan pembagian kewenangan langsung untuk pengelola aplikasi *simak desa* sudah cukup baik. Dilihat dari adanya tugas dan wewenang masing-masing.

Hal ini sesuai dengan pendapat George C. Edward III (Leo Agustino, 2022:158) berpendapat yaitu *Standar Operating Procedures* (SOP) yang lebih fleksibel adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana untuk melakukan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, atau standar minimum yang dibutuhkan warga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Tentang Penggunaan Aplikasi Simak Desa Oleh Pemerintah Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut belum berjalan dengan optimal dalam pelaksanaannya. Dilihat dari 13 indikator implementasi kebijakan yang dijadikan alat ukur dalam penelitian, untuk semua indikator menunjukkan proses yang baik. Tetapi ada 4 dimensi atau indikator yang belum berjalan dengan baik yaitu indikator komunikasi, sumber daya, dan disposisi.

Adapun hambatan yang ditemukan pada implementasi kebijakan tentang penggunaan aplikasi

simak desa oleh Pemerintah Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut adalah kurang maksimalnya penyuluhan kepada masyarakat, petugas pengelola aplikasi masih belum konsisten dalam memberikan informasi tentang kemudahan menggunakan aplikasi *simak desa* kepada masyarakat karena masyarakat masih belum mengetahui kemudahan aplikasi *simak desa*, masih kurangnya kesiapan dari segi kompetensi petugas pengelola aplikasi, masih kurangnya dedikasi dari pengelola aplikasi.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut yaitu pemerintah desa harus melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong agar dapat memberikan informasi secara jelas, pengelola aplikasi harus konsisten dalam menyampaikan informasi tentang kemudahan pelayanan menggunakan aplikasi *simak desa* kepada masyarakat, meningkatkan kompetensi dari petugas pengelola aplikasi, meningkatkan komitmen yang tinggi dari petugas pengelola aplikasi *simak desa* untuk mewujudkan program desa digital.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Publik*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Harsono, Hanifah, *Implementasi Kebijakan dan Publik*. Jakarta : Grafindo Jaya. 2002.
- Leo Agustino, 2022. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. ISBN 979-8433-50-6. Bandung: Alfabeta,cv.
- Putra.Aditya Subagyo,dkk (2022) *Dampak Implementasi Kebijakan Digital Governance Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik di Kantor Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis*
- Setiawan, G. (2004). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Remaja Rosdakarya Offset.
- Subarsono,2021.*Analisis Kebijakan Publik konsep,teori dan aplikasi*.ISBN 979-3721-67-7.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta